

PEMERINTAH SIAPKAN TOTAL ANGGARAN RP 26 M

25 Warga Terdampak Tol Mulai Terima Ganti Untung

KALASAN (KR) - Sebanyak 25 warga Sleman yang terdampak pembangunan proyek jalan tol Jogja - Solo terima pembayaran ganti untung. Pembayaran disaksikan langsung oleh Bupati Sleman Sri Purnomo di Kantor Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan, Jumat (8/1).

Kepala Pelaksana Pengadaan Tanah Kanwil BPN DIY Suhendro mengatakan, pembayaran ganti untung kepada 25 warga Sleman terdampak jalan tol ini merupakan tahap pertama dan masuk dalam anggaran Tahun 2020. "Pada tahap pertama ini ada 25 warga yang mendapat pembayaran ganti untung. Sebetulnya ada 50

bidang tanah yang diusulkan. Namun setelah dilakukan validasi ulang oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), 25 bidang diserahkan ganti untungnya. Untuk sisanya dalam proses pelengkapan data dan dalam waktu dekat akan disampaikan ke LMAN untuk segera dibayarkan," katanya. Adapun dalam tahap

awal proyek pembangunan Jalan Tol Jogja - Solo di DIY, wilayah terdampak berada di wilayah Kabupaten Sleman yaitu tepatnya Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, Ngaglik dan wilayah Gamping. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY Krido Suprayitno menuturkan, terdapat 294 pemilik bidang tanah yang akan mendapatkan ganti untung secara bertahap. Jumlah ganti untung yang disiapkan bagi warga terdampak tersebut total Rp 26 miliar lebih. "Sebanyak 25 warga yang hari ini mendapat ganti untung merupakan bagian dari keseluruhan sebanyak 294 di

Purwomartani yang mana akan kita selesaikan Insya Allah sampai dengan bulan April," jelasnya. Sementara Bupati Sri Purnomo mengimbau warga penerima ganti untung untuk bijak dalam memanfaatkan uang hasil ganti untung. "Kami berharap nantinya bisa dimanfaatkan untuk kembali (membeli) tanah untuk keberlanjutan. Untuk masyarakat terdampak yang belum menerima ganti untung untuk tidak perlu khawatir karena proses ganti untung memerlukan tahapan termasuk tahapan melengkapi berkas," kata Bupati. **(Has/Aha/Ira)-f**



KR-Istimewa

Penyerahan ganti untung untuk warga terdampak pembangunan jalan tol.

Angka Stunting di Sleman Menurun

SLEMAN (KR) - Angka stunting di Kabupaten Sleman pada tahun 2019 mengalami penurunan. Hal ini bisa diraih karena beberapa faktor. Termasuk jumlah kader kesehatan yang mencukupi dan terlatih dalam pemantauan pertumbuhan anak. "Angka stunting di Kabupaten Sleman mengalami perbaikan dari tahun 2017 sebanyak 11,99 persen menjadi 8,38 persen pada tahun 2019," ungkap Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sleman dr Wisnu Murti Yani MSc di kantornya, Jumat (8/1). Menurutnya, faktor pendorong keberhasilan pencapaian ini salah satunya karena tersedianya regulasi Perbup Nomor 38/2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Selain itu juga adanya Perbup Nomor 27 /2019 tentang Program Percepatan Penanggulangan Balita Stunting.

"Kami juga mempunyai beberapa inovasi untuk mencegah bayi mengalami stunting. Mulai dari Gerakan Tanggulasi Anemia Remaja dan Thalasemia (Getar Thala), Pelayanan Antenatal Care Terpadu Menuju Triple Eliminasi Menuju Semua Layanan (Pandu Teman), Pecah Ranting

(Pencegahan Pada Rawan Stunting) dan Gambang Stunting (Gerakan Ajak Menimbang Cegah dan Atasi Stunting)," ungkap Wisnu. Selain itu, Dinas Kesehatan Sleman juga menggalakkan adanya konselor ASI dan motivator Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) terlatih di 25 puskesmas dan beberapa rumah sakit. Untuk menekan angka stunting, Dinas juga terus menggenjot jumlah kader kesehatan. Sehingga untuk jumlahnya bisa mencukupi dan terlatih dalam melakukan pemantauan pertumbuhan dan membantu pelaksanaan kegiatan. "Saat ini jumlah nutrisionis di Puskesmas cukup memadai dengan penambahan nutrisionis dari tenaga kontrak BOK Puskesmas," tandasnya. Untuk mendukung program ini, lanjut Wisnu, Kabupaten Sleman juga telah memiliki sistem informasi, pencatatan dan pelaporan berbasis elektronik seperti SIM KIA Sembada dan Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).

"Selain itu juga butuh kerjasama lintas program dan lintas sektor dan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting," tutupnya. **(Aha)-f**

TATAP MUKA BELUM BOLEH DILAKUKAN Try Out SD Digelar Daring

SLEMAN (KR) - Try out ujian SD tingkat kabupaten yang sedianya akan digelar di sekolah atau tatap muka akhirnya dibatalkan. Hal itu menyusul mulai diberlakukannya Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) di DIY yang mulai berlaku Senin (11/1) sampai Senin (25/1). Kepala Dinas Pendidikan Sleman Ery Widaryana saat dikonfirmasi Jumat (8/1) membenarkan pembatalan try out yang sebelumnya akan digelar di sekolah. "Betul, try out SD yang sedianya digelar di sekolah mulai Senin (11/1) sampai Rabu (13/1) akhirnya dibatalkan. Namun try out tetap digelar secara daring," ujarnya. Menurut Ery, pembatalan try out di

sekolahan tersebut berdasarkan hasil rapat Tim Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Sleman menindaklanjuti hasil rapat dengan Gubernur DIY terkait PTKM mulai 11 sampai 25 Januari 2021. Selain itu juga sesuai dengan Instruksi Bupati Sleman No 1 Tahun 2021 tentang Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat. "Hasil rapat itu salah satunya memutuskan belajar mengajar dilaksanakan secara daring. Oleh karena itu, untuk kegiatan try out bagi kelas 6 SD se Kabupaten Sleman mulai 11 sampai 13 Januari 2021 tidak diizinkan dengan tatap muka. Try out dilaksanakan secara daring," tegas Ery. **(Has)-f**

BEDAH KISI-KISI BARENG ULTRA DI NGEMPLAK Kapanewon Ngemplak Target Lima Besar



KR-Antri Yudiandiyah

Guru SD kelas VI di Kapanewon Ngemplak fokus mendengarkan materi dalam bedah kisi-kisi.

NGEMPLAK (KR) - Sebanyak 81 guru SD kelas VI di Kapanewon Ngemplak Sleman memaksimalkan kesempatan mendapatkan materi menarik dalam Bedah Kisi-Kisi USDA bersama Ultra yang berlangsung di SDN Karanganyar Ngemplak, Kamis (7/1). Sebanyak 81 guru dari 27 sekolah SD baik negeri maupun swasta di Kapanewon Ngemplak tersebut fokus mendengarkan pemaparan

materi dari narasumber. Terutama di mata pelajaran matematika yang kerap jadi momok bagi siswa saat ujian. "Pada tahun 2021, 965 siswa SD kelas VI di Kapanewon Ngemplak akan mengikuti USDA. Kami berharap ada peningkatan prestasi. Tahun 2019 lalu peringkat sembilan se kabupaten, harapannya bisa tembus lima besar tahun ini," tegas Yamahsari, Ketua Kelompok Kerja

Kepala Sekolah (K3S) Kapanewon Ngemplak. Menurutnya, materi bedah kisi-kisi diharapkan dapat ditransfer guru untuk para murid sebagai panduan dalam belajar. Sehingga siswa dapat dengan percaya diri tinggi menempuh ujian. "Guru nantinya dapat transfer materi ke siswa, jadi panduan dalam belajar. Sehingga peningkatan prestasi, itu yang kami harapkan," sambungnya. Selain itu, pihaknya pun telah menyiapkan sejumlah solusi untuk mendorong prestasi siswa di tengah Pandemi Covid-19. Jika Februari, tatap muka belum dapat dilakukan, pihaknya akan memberikan bimbingan khusus pada siswa kelas VI. "Kami lakukan home visit. Satu kelompok lima orang. Guru bisa datang di satu hingga tiga tempat setiap hari. Karena saat ini tak maksimal dengan sistem daring," tambahnya. **(Yud)-f**

ADA PERSYARATAN TAMBAHAN

18 Paket Pekerjaan Belum Dilelang

SLEMAN (KR) - Sebanyak 18 paket pekerjaan belum dilelangkan oleh Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kabupaten Sleman. Hal itu dikarenakan masih ada persyaratan tambahan yang akan ditambah oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP). Kepala BLP Kabupaten Sleman Mirza Anfansuri ST MT, sebelumnya 18 paket pekerjaan itu telah dikirim ke BLP. Namun setelah dilakukan pencermatan oleh tim, masih perlu ada persyaratan tam-

bahan. "Pencermatan sudah selesai. Tapi memang perlu ada persyaratan tambahan dan itu sudah kami sampaikan ke DPUPKP untuk dilengkapi," katanya kepada KR, Jumat (8/1). Menurut Mirza, jika nanti persyaratan sudah dilengkapi, 18 paket pekerjaan akan segera dilelangkan. Dengan harapan, awal tahun ini dapat pemenang proyek dan segera dilakukan pelaksanaan fisik. "Kalau nanti sudah lengkap, nanti tinggal tayang saja untuk

dilelang. Semoga dalam waktu dekat, ada pemenang dan pengerjaannya segera terlaksana," tuturnya. Kepala DPUPKP Kabupaten Sleman Taufiq Wahyudi ST MTP membenarkan adanya persyaratan tambahan terhadap 18 paket pekerjaan. Sekarang ini sedang dilakukan pembahasan dengan tim untuk menambah persyaratan. "Sedang kami diskusikan dengan tim. Kemungkinan dalam waktu dekat sudah selesai dan bisa segera dilelangkan," katanya. **(Sni)-f**

PEMKAB GENCARKAN SOSIALISASI PTKM

Awasi Ketat Kegiatan Berpotensi Munculkan Kerumunan

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman gencar mensosialisasikan aturan mengenai Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM). Aturan tersebut secara resmi diberlakukan selama 2 minggu, mulai dari 11 Januari sampai 25 Januari 2021. Sosialisasi mengenai PTKM tersebut berdasarkan instruksi Bupati Sleman nomor 01/INSTR/2021 Tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sleman. Hal tersebut menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 serta Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 1/INSTR/2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di DIY. Plt Aspek Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sleman Joko Supriyanto menje-

laskan mengenai pembatasan tersebut, meliputi tempat kerja/perkantoran dengan 50% work from home (WFH) dan 50% work from office (WFO), pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring, kegiatan restoran/rumah makan sebanyak 25% dari kapasitas tempat duduk sampai dengan pukul 19.00 WIB. "Pembatasan pengunjung mal dan tempat wisata, serta mengizinkan pekerja konstruksi dan tempat ibadah sebanyak 100% dengan protokol kesehatan yang ketat," ungkapnya di Ruang Sembada Setda Sleman, Jumat (8/1). Joko mengingatkan kepada panewu dan lurah se Kabupaten Sleman untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 dan Instruksi ini agar disosialisasikan kepada masyarakat dan selalu dipantau dalam penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. "Terlebih untuk acara hajatan dan tempat wisata di desa-desa agar dikondisikan supaya tidak terjadi kerumunan dengan

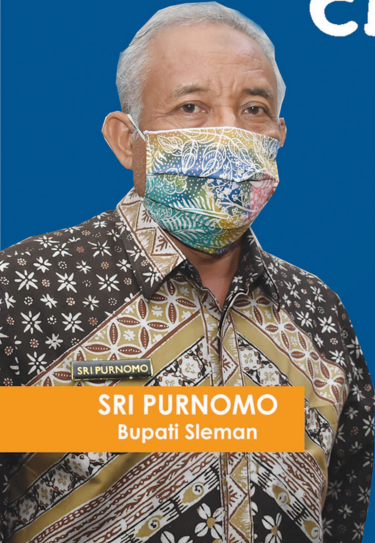
protokol kesehatan yang lebih ketat dan tidak melaksanakan makan/minum di tempat. Termasuk tempat wisata yang ada untuk selalu dipantau agar menerapkan protokol kesehatan yang ketat," tegasnya. Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sleman Susmiarto menjelaskan, Satpol PP akan melibatkan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi lainnya untuk membantu dalam melakukan penertiban pelanggaran penerapan disiplin protokol kesehatan. Beberapa pasar besar tetap beroperasi untuk menjaga perekonomian masyarakat dan agar tidak terjadi lonjakan harga. "Dalam mendayagunakan patroli menjadi 2 shift, yang kemarin memantau objek vital seperti perkantoran pemantauan sekarang lebih ke arah yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti objek wisata, memantau tentang jam operasional dan protokol kesehatan yang dijalankan," ujar Susmiarto. **(Has)-f**



PEMBERLAKUAN PENGETATAN SECARA TERBATAS KEGIATAN MASYARAKAT di Kabupaten Sleman 11 s/d 25 Januari 2021

PATUHI PROTOKOL KESEHATAN UNTUK MENCEGAH
PENULARAN COVID-19 DENGAN MENERAPKAN

CITA MAS JAJAR



SRI PURNOMO
Bupati Sleman



MENCUCI TANGAN MEMAKAI MASKER MENJAGA JARAK



SRI MUSLIMATUN
Wakil Bupati Sleman

**MENJAUHI KERUMUNAN
MEMBATASI MOBILITAS**